

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA MALANG DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Guntur Jatmiko Aji¹, Yaqub Cikusin², Hirshi Anadza³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: nyofake.98@gmail.com*

ABSTRAK

Pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan seberapa berhasil dan bagaimana pengembangan dari program Kota Layak Anak Kota Malang dalam memenuhi hak anak dan perlindungan anak. Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan awal penulis melihat Melihat dari masih banyaknya permasalahan terkait pelanggaran Hak anak dalam pemenuhan dan perlindungan anak yang terjadi di Kota Malang. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Malang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi, Diskusi, Analisis Negatif, Membercheck yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak di Kota Malang bahwa dalam pengembangan tersebut sudah terbilang baik, akan tetapi masih kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait program kota layak anak. (2) Yang menjadi penghambat adalah kurangnya penguatan kebijakan dari pemerintah kota untuk OPD dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut : Melakukan evaluasi serta laporan tahunan jalannya program kota layak anak di kota malang, Melakukan delegasi dari Dinas Perlindungan Anak kepada setiap Lemabaga Pemerintah Daerah dan beberapa jaringan LSM untuk tetap mengawal jalannya program tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Hak Anak, Perlindungan Anak

Pendahuluan

Komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi perjanjian secara yuridis tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak. Indonesia membuat kebijakan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya kebijakan tersebut mengakibatkan negara Indonesia harus memberikan jaminan dan memenuhi kebutuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk mentransformasikan Hak Anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah

mengembangkan Kota Layak Anak di setiap daerah Kabupaten/Kota untuk memudahkan tercapainya pembangunan nasional yaitu terwujudnya IDOLA (Indonesia Layak Anak).

Kota Layak Anak atau bisa disebut KLA merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen dan memiliki usaha untuk melindungi, mencegah dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Menurut Lenny Rosalin, (2016:1), menyebutkan bahwa Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan

dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tujuan Kota Layak Anak dibagi menjadi dua, secara umum untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dan secara khusus untuk membantu inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak pada suatu wilayah Kabupaten/Kota. (Rosalin Dkk 2016:1)

Kota Malang sendiri kini menerapkan dan mengembangkan kebijakan KLA pada tahun 2015 dengan sebutan MAKOLA (Malang Kota Layak Anak). Dengan adanya Makola ini Kota Malang berharap mampu menjadikan Kota Malang sebagai kota yang ramah terhadap anak.

Konsep Makola (Malang Kota Layak Anak) sendiri dibangun sesuai dengan cita-cita Kota Malang untuk menjadikannya Kota Layak terhadap Anak dengan adanya PERDA No 12 tahun 2015 tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Kebijakan dan peraturan tersebut juga dilandasi dengan melihat kondisi anak di Kota Malang terkait dengan permasalahan anak yang timbul pada lingkungan Kota Malang.

Saat ini Kota Malang telah berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan Kota Malang menjadi Kota Layak Anak dan lingkungan yang ramah anak, dengan adanya prestasi yang diraih yaitu sebagai Kota Layak Anak tingkat Madya. Perolehan penghargaan ini dikarenakan kota Malang telah menyediakan beberapa fasilitas anak dan pos pengaduan perlindungan anak, sesuai dengan beberapa indikator yang sudah ditetapkan oleh KemenPPPA dalam 5 Klaster tersebut pada tahun 2015 dan 2019, dengan mewujudkan Kota Malang sebagai kota dengan sarana dan prasarana, fasilitas dan program untuk anak.

Akan tetapi dengan adanya prestasi tersebut Wali Kota Malang Sutiaji merasa kurang puas dengan adanya Penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya. Menurut Wali Kota Malang Sutiaji, kami kurang puas atas prestasi Kota Layak Anak yang di raih saat ini, kami akan terus berupaya untuk memenuhi hak-hak anak mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas ruang bermain serta berbagai akses untuk menunjang hak anak, untuk menjamin perlindungan dan pencegahan kekerasan anak, sampai kami mendapatkan gelar Malang Kota Layak Anak pada tingkat Nindya.

Untuk menjadikan Malang Kota Layak Anak tingkat Nindya tentunya tidaklah mudah, melihat beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Malang yaitu diantaranya tingginya kasus pelanggaran Hak

Anak di kota Malang. Menurut Pimpinan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Malang mengatakan bahwa kekerasan di Kota Malang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan mulai pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 terdapat 36 kasus, sedangkan tahun 2017 terdapat 71 kasus dan 2018 terdapat 74 kasus, Sedangkan pada tahun 2019 November DP3AP2KB telah menerima dan menangani laporan sebanyak 50 kasus kekerasan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Malang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari itu tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Manfaat Penulisan

Setiap peneliti memiliki manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penambahan keilmuan tentang Implementasi kebijakan dan dapat memberi pengetahuan pada kajian tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak
2. Manfaat Praktis
Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil yang sudah diteliti dapat memberikan masukan positif kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang dan Kabupaten/Kota lainnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melakukan penelitian dengan sasaran yang ada digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai informasi, kondisi, situasi, atau berbagai variabel.

Dengan demikian penelitian ini akan memaparkan secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis berkaitan tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan pengembangan tersebut.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, dengan sub fokus.
 - a) Aspek Pemenuhan Hak Anak yang terdapat dalam 5 Klaster Kota Layak Anak.
 - b) Aspek Perlindungan Anak
 - Pembentukan Pos Pengaduan Pelanggaran Hak Anak
 - Rehabilitasi Anak
 - Penyelesaian Kasus Pelanggaran Anak
2. Faktor penghambat dalam Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak dengan sub fokus faktor penghambat implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak

Situs dan Latar Penelitian

Didalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Malang. Sedangkan situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data maupun informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam bab terdahulu, maka situs dari penelitian ini adalah DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Malang.

Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti (tidak melalui perantara). Data ini dikumpulkan secara langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh data lapangan. Untuk itu teknik atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Keabsahan Data

Sugiyono (2008:270) mengemukakan keabsahan data bagian yang sangat penting dimana digunakan untuk menyakinkan peneliti bahwasanya data yang telah di dapatkan oleh peneliti itu benar adanya juga dapat dipercaya. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Meningkatkan Ketekunan
3. Triangulasi
4. Diskusi Dengan Teman Sejawat
5. Analisis Negatif
6. Membercheck

Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Malang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi

Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Malang, mengatakan bahwa :

“sebenarnya Kota Layak Anak adalah salah satu program kebijakan yang diturunkan dari pusat yang berdasarkan hasil dari Konvensi Hak Anak mas, dengan tujuan untuk menjaga tumbuh kembang anak dengan baik tanpa ada unsur pemotongan hak.”

Adapun tolak ukur pembangunan Kota Layak Anak sudah ditetapkan oleh KemenPPPA untuk menilai bahwa Kota tersebut sudah layak anak. Seperti yang dikatakan oleh :

“Program Kota Layak Anak juga terdapat 5 klaster yang sudah ditetapkan oleh pusat sebagai tolak ukur pengembangan pembangunan Kota Layak Anak diantaranya adalah, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Perlindungan Khusus”.

Dalam mencapai upaya terciptanya Kota Malang ramah anak. DP3AP2KB bekerja sama dengan beberapa OPD dan lembaga swasta seperti perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat untuk mempermudah mencapai Kota Malang ramah Anak. Seperti yang dijelaskan oleh Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Malang :

“upaya pemenuhan hak anak, sebenarnya kami juga bekerja sama terhadap beberapa OPD di Kota Malang yaitu diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Perkebunan, dan tiap-tiap kelurahan yang ada di Kota Malang.

Dalam melakukan kerja sama dengan seluruh OPD dan LSM yang berada di Kota Malang akan mempermudah Dinas Sosial Perlindungan Anak dalam menjalankan kebijakan dan memaksimalkan pengembangan program yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial Perlindungan Anak. Seperti yang diucapkan oleh Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Malang :

“Tujuan bekerja sama dengan beberapa OPD di Kota Malang sebenarnya mas, membantu untuk mempermudah kami dalam menjalankan beberapa program kota layak anak tersebut. Tidak hanya itu kami juga bekerja sama dengan beberapa LSM dan perusahaan untuk membantu dan mendukung program yang kami jalankan.”

Adapun dalam pengembangan 5 klaster yang Di sampaikan oleh Ibu Puji di kota malang adalah sebagai berikut :

- a) Hak Sipil dan Kebebasan
- b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- d) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- e) Perlindungan Khusus

2. Faktor Penghambat dalam menjalankan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang.

Dalam menjalankan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang ada beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam menjalankan kebijakan tersebut diantaranya adalah lemahnya komunikasi dan koordinasi antara OPD dan LSM, kinerja sumberdaya manusia yang kurang, kurangnya anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi dan melindungi anak. Seperti yang di jelaskan Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Malang :

“sebenarnya yang menjadi faktor penghambat dalam proses pengembangan kebijakan kota layak anak itu yang sangat memengaruhi adalah suatu jalinan komunikasi dan koordinasi kepada seluruh OPD. Kenapa kok susah karena setiap koordinasi dan menajalin kerja sama itu semacam hanya menjalin hubungan saja seperti tidak ada tuntutan yang kuat, karena saat ini belum ada perda yang mendukung mas”

Selain itu hambatan dalam menjalankan kebijakan kota layak di Kota Malang adalah kekurangan SDM dalam memaksimalkan kebijakan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Malang :

“Selain mejalin komunikasi dan koordinasi di tiap-tiap OPD kita juga kekurangan SDM untuk menghendel jalannya program, kalo kita bicara tentang pemenuhan hak anak itu sangat luas mas mulai dari kehidupan mereka dilingkungan sosial, kesehatan, pendidikan bahkan sampai peradilan. Jadi kami juga membutuhkan SDM yang cukup banyak lah untuk mejalankan program tersebut.”

Dalam menjalankan kebijakan kota layak anak Dinas Sosial Perlindungan Anak juga mengalami hambatan, yaitu anggaran dalam menjalankan kebijakan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya anak juga menjadi faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Hambatan yang di alami Dinas Sosial Perlindungan Anak dalam menjalankan kebijakan tersebut adalah efektif atau tidaknya program yang sudah di laksanakan dilapangan akan berdampak penuh kepada Dinas Sosial Perlindungan Anak. Sedangkan menurut petugas BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai perencana awal mengenai pengembangan Kota Layak Anak di Kota Malang beranggapan bahwa yang menjadi penghambat jalannya kebijakan kota layak anak adalah kurangnya maksimal di tiap-tiap OPD dalam menjalankan kebijakan tersebut.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Malang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak

Sebagai wujud dalam menciptakan Kota Malang Ramah Anak maka dari itu pemerintah Kota Malang mulai menjalankan pengembangan kebijakan Kota Layak Anak pada tahun 2006 dengan memulainya membangun taman yang memfalisasi anak untuk bermain. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui perkembangan mengenai Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang. Hasil ini dapat dilihat/dianalisis dengan menggunakan teori Edward III (1980) dalam Subarsono (2015:90) :

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian peniti dengan beberapa narasumber diantaranya kepada Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial dan sekaligus penanggung jawab jalannya kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang dan beberapa keterangan warga di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa Komunikasi atau target sasaran kebijakan Kota Layak Anak sudah cukup baik namun disisi lain ada beberapa hasil dari keterangan warga mengenai program yang sudah di terapkan dilapangan, beranggapan bahwa cukup puas dengan adanya fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hak anak. Akan tetapi ada sebagian masyarakat masih dibilang kurang memahami terkait program kebijakan Kota Layak Anak.

b. Sumber Daya

Bedasarkan kesimpulan hasil penelitan yang dilakukan oleh peneliti kepada Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Malang, dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia dan finansial dalam menjalankan kebijakan Kota Layak Anak di kota malang masih terbilang kurang, karena banyaknya program yang

membutuhkan SDM dan anggaran yang cukup banyak untuk memaksimalkan kebijakan tersebut.

Melihat fakta dilapangan terkait implementasi kebijakan kota layak anak masih terbilang kurang dalam kapasitas SDM dan sumber daya finansial. Karena masih banyaknya program yang belum mencapai sasaran seperti kurangnya fasilitas taman di beberapa lokasi dan kurangnya tenaga pekerja dalam melaksanakan komunikasi dan sosialisasi terkait program kota layak anak.

c. Disposisi

Merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, ataupun sifat demokratis. Apabila seorang implementator memiliki disposisi baik, maka dalam menjalankan kebijakan akan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tersebut dan berlaku sebaliknya.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, peneliti kepada Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Malang dapat disimpulkan bahwa aspek kegiatan mengenai beberapa program yang sudah dijalankan dilapangan. Hanya saja masih kurang dalam mensosialisaikan kepada masyarakat kota malang terkait kegunaan dan tujuan program tersebut.

Melihat fakta dilapangan terkait implementasi kebijakan kota layak anak sudah terbilang baik. Karena dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan jujur dan tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan hak anak dan melindungi anak, dengan dibuktikannya berhasil mendapatkan predikat kedua yaitu predikat madya terkait pengembangan kota layak anak dalam mememnuhi kebutuan anak yang sesuai dalam 5 klaster Kota Layak Anak.

d. Struktur Organisasi dan kelembagaan

Merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan kebijakan yang signifikan dalam operasi yang standar atau SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan juga menyeragamkan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh implementator dalam organisasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara dilapanagan dapat di simpulkan bahwa melihat standart pegawai dalam menjalankan kebijakan kota layak anak sudah terbilang baik. Karena ditunjukkannya dengan adanya mengawal dan menyelesaikan kasus pelanggaran hak anak mulai dari rehabilitas anak sampai peradilan selesai dan juga anak sudah bisa pastikan untuk melakukan kegatannya sehari-hari seperti biasa.

2. Faktor Penghambat dalam menjalankan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang

Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan pasti ada beberapa faktor yang menghambat jalannya kebijakan tersebut seperti yang di kemukakan oleh Edward III dalam Subarsono Mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa yang mempengaruhi proses jalannya kebijakan diantaranya adalah Komunikasi, SDM, Disposisi, Struktur Organisasi, dalam hal tersebut dapat mempengaruhi baik faktor yang mendukung atau faktor yang menghambat

Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan beberapa faktor yang menghambat jalannya kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang. Diantaranya yaitu komunikasi dan koordinasi kepada OPD dan LSM yang bersangkutan dengan program, kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial, kurangnya kesadaran masyarakat terkait program kota layak anak.

a. Lemahnya Komunikasi dan Koordinasi kepada OPD dan LSM

Dalam menjalankan kebijakan kota layak anak pada dasarnya membutuhkan kerja sama kepada semua lembaga pemerintah daerah yang ada di kota malang dan beberapa LSM dan perusahaan yang ada di kota malang untuk membantu dan mempermudah menjalankan kebijakan tersebut, seperti meminta data kelahiran anak, kematian anak, angka putus sekolah, bahkan sampai dana bantuan atau hibah dari perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti kepada beberapa narasumber di Dinas Perlindungan Anak Dinas Sosial dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat implementasi kebijakan kota layak, adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi kepada seluruh OPD dan LSM untuk membantu mempermudah mencapai kota yang ramah anak. Kurangnya komunikasi dan koordinasi kepada OPD dan LSM dikarenakan tidak ada peraturan daerah yang menekan penuh untuk keseluruhan OPD untuk menjadikan program kota layak anak, menjadi tugas pokok pada tiap-tiap OPD.

b. Kurangnya SDM dan Finansial dalam menjalankan program

Tentunya dalam menjalankan kebijakan kota layak anak membutuhkan sumber daya manusia dan finansial yang cukup banyak untuk melancarkan beberapa program dengan maksimal.

Akan tetapi melihat realitas yang ada dilapangan dan observasi serta wawancara peneliti kepada beberapa pegawai di Dinas Perlindungan Anak Dinas Sosial dapat disimpulkan bahwa mengalami kurang tenaga kenerja dan anggaran untuk melaksanakan program kota layak anak yang sesuai dengan 5 Klaster tersebut dengan ditunjukkannya kurangnya koordinasi kepada seluruh lembaga daerah yang ada di kota malang dan LSM

untuk melakukan pendampingan dan tetap memiliki komitmen untuk mendukung secara penuh terciptanya kota malang ramah anak dan melihat sebagian taman yang memiliki kekurangan fasilitas dan keterlambatan dalam memperbaiki fasilitas yang rusak.

c. Kesadaran Masyarakat

Dalam menjalankan kebijakan tidak terlepas dari kesadaran lingkungan masyarakat untuk mematuhi segala bentuk program kota layak anak sebagai bentuk mendukung dalam menciptakan Kota Malang yang ramah anak.

Akan tetapi berdasarkan fakta dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara peneliti kepada petugas Dinas Perlindungan Anak Dinas Sosial dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang dalam mendukung dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam beberapa program kota layak anak dengan ditunjukkannya banyaknya masyarakat masih banyak yang merokok dikawasan yang bebas rokok yang berada di lingkungan taman dan beberapa lingkungan yang lain sudah di beri peringatan dilarang merokok, selain itu juga masih banyak remaja menggunakan fasilitas taman yang tidak baik seperti merusak fasilitas taman dan melakukan perbuatan zina di lingkungan taman.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terkait Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak di Kota Malang bahwa dalam pengembangan tersebut sudah terbilang baik, akan tetapi masih kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait program kota layak anak. Karena masih banyak masyarakat kurang paham mengenai beberapa program tersebut.

Disisi lain dalam melakukan observasi peneliti juga menemukan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang kurang ramah terkait pembuatan akte kelahiran anak di Dispendukcapil.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan kota layak anak di kota malang peneliti menggunakan teori yang di sampaikan oleh Edward III dalam Subarsono (2015:90), Edward mengatakan bahwa untuk menganalisis suatu kebijakan maksimal atau tidaknya dipengaruhi oleh empat variabel diantaranya yaitu Komunikasi dan sasaran kebijakan, SDM dan anggaran, Disposisi, Struktur organisasi implementator.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terkait faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kota layak anak di kota malang tersebut diantaranya adalah:

- a. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi dalam menjalin hubungan kerjasama kepada seluruh

OPD dan beberapa LSM untuk mendukung menciptakan Kota Malang yang ramah anak.

- b. Kurangnya SDM dan anggaran dalam menjalankan kebijakan kota layak anak dan memenuhi kebutuhan hak anak seperti kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program kota layak anak dan kurangnya fasilitas bermain di beberapa taman.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang ramah anak, masih banyak masyarakat yang acuh terhadap larangan untuk tidak merokok di lingkungan taman dan juga masih banyak remaja yang merusak fasilitas taman serta melakukan kegiatan yang tidak patut dilakukan dilingkungan taman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di kota malang dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak harus lebih di maksimalkan dan di optimalkan lagi. Dengan harapan agar mampu memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat dan tentunya membuat anak menjadi merasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan manapun. Berikut beberapa saran yang peneliti dapat berikan:

1. Melakukan evaluasi serta laporan tahunan jalannya program kota layak anak di kota malang.
2. Melakukan delegasi dari Dinas Perlindungan Anak kepada setiap Lemabaga Pemerintah Daerah dan beberapa jaringan LSM untuk tetap mengawal jalannya program tersebut.

Daftar Pustaka

- Bahri, I. S. (2020). *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat.
- Budi, W. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Pross, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Hamudy, M. A. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makasar. *Jurnal Bina Praja*.
- Herlina, N., & Nadiroh. (2018). Peran Strategi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Terhadap Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*.
- I. H. (2019). *50 Strategi Pembelajaran Populer*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ica. (2019, November 17). *Kekerasan Anak Ada di Sekitar Kita*. Retrieved from malang-post.com: <https://malang-post.com/berita/detail/kekerasan-anak-ada-di-sekitar-kita#gsc.tab=0>
- Ika, Heni, & Dkk. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Peogram Kota Layak Anak di Kecamatan Gading, Kabupaten Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018, Juli 23). *PENGUATAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK*. Retrieved from Kemenpppa.go.id: <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1803/penguatan-keluarga-dalam-mewujudkan-kabupaten-kota-layak-anak>
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018, Desember 07). *Percepat KLA Demi Jamin Pemenuhan HAK Anak*. Retrieved from Kemenpppa.go.id: <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1992/percepat-kla-demi-jamin-pemenuhan-hak-anak>
- Lexy, M. J. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Malang Kota Layak Anak. (2020, Juni 11). *Produk Hukum*. Retrieved from makola.malangkota.go.id: <https://makola.malangkota.go.id/>
- Munsir, I. (2019, Juli 24). *Menteri Yohana Harap Denpasar-Surabaya Jadi Kota Layak Anak*. Retrieved from m.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4636745/menteri-yohana-harap-denpasar-surabaya-jadi-kota-layak-anak>
- Putra, T. P. (2019, Juli 23). *Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019*. Retrieved from Indonews.id: <https://indonews.id/artikel/22570/Penghargaan-Kabupaten-Kota-Layak-Anak-2019/>
- Reisdian, R., Soeaidy, M. S., & Sukanto. (2016). Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rosalin, L., & Dkk. (2016). *Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Rumtianing, I. (2014). Kota Layak Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Sidik , F. M. (2020, Februari 18). *KPAI Catat 4.369 Kasus Pelanggaran Hak Anak di Tahun*

- 2019 . Retrieved from m.detik.com:
<https://news.detik.com/berita/d-4903880/kpai-catat-4369-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-tahun-2019>
- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2017). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Yambise, Y. S. (2015). *Profil Anak Indonesia 2015*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- Zain. (2019, Juli 25). *Kota Malang Kembali Raih Kota Layak Anak 2019 Kategori Madya*. Retrieved from Merdeka.com:
<https://malang.merdeka.com/kabar-malang/kota-malang-kembali-raih-kota-layak-anak-2019-kategori-madya-190725q.html>